

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indoensia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Tabor Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Adrian Fernando Simangunong, *Mengkritisi Hukum Pengadaan Tanah dan Penilaian Ganti Kerugian Era UU Cipta Kerja*, Depok, Rajawali Pres, 2022
- Aminurdin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- _____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT.Gramedia, 1984
- Arba, H.M, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Bagir Manan, *Hukum Positid Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2004
- Bambang Poernomo, *Pokok – Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2003
- Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2006
- Barda Nawawa Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2017
- Busya Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2011
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006
- Chatrina D.R dan Dessy Marliani, *Pendidikan Antikorupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Djoni S.G, *Hukum Pengadaan Tanah Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, UII Press, 2018

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Pinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020
- _____, *Hukum Notaris di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- _____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Surabaya, Refika Aditama, 2007
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- _____, *Penegakan Etika Profesi Notaris dari Prespektif Pendekatan Sistem*, Jakarta, Media Notariat, 2002
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2014
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2013
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo, 2011
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Indonesia Corruption Watch, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, ICW, 2014
- Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris Raih Asa Sukses*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009
- Ira Koesomawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009

- Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in The Land Acquisition*, Yogyakarta, Buku Litera, 2016
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2016
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, 2006
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Lili Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- M. Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam Ajaran Penyerataan*, Jakarta, Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminakitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2014
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan ke dua, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco, 1995
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2013
- _____, *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bandung, 2012
- Maria SW, Sumarjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2014
- Mas Alim Katu, *Korupsi Malu Ah!*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2009

- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dkk, *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, MaPPI FH UI, 2021
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002
- Mohammad Khusnaini, *Ekonomi Publik*, UB Press, Malang, 2019
- Muhadar dan Ratnaningsih, *Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung, Alumni, 1992
- Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009
- Paulus J Soepratignya, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu dan di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jawaban Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017
- Salim dan Erlie Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali, 2014
- Salim H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Sianturi dan Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Surya Grafika, 2002
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sandi-Sandi Ilmu Hukum Tata Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009

Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009

Yagus Suyadi, *Tindakan Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2023

Soekanto Soejono, *Pengaruh Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986.

Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI jo putusan Mahkamah Agung Nomor 6057 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2023.

C. Jurnal dan Tesis

Ahmad Azyumardi Azra, “Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menggunakan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 7, No. 1 (September: 2024), 2621-9883, <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2024.20098>.

Arianus Haref, “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, 8, No. 1 (Februari 2020): 434, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1649>.

Bias Bumi B dan Yunanto, “Interpretasi Hukum Terhadap Pembuatan Akta Tanah Oleh Notaris Berdasarkan Kewenangannya”, *Jurnal Hukum*, 17, No. 2 (2024), 2086-1702, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/48669/pdf>

Chaterinne Felicia Shihite, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris”, *Jurnal Notarius*, 2, No. 1 (Januari-Juni 2023): 2089-1407, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15892/9810>.

Erika Gita Mogi, dkk, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Hukum*, 9, No.8, (Desember 2021): 221,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/38721/35284>.

Eva Achjani, “Proporsionalitas Penjatuan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41, No.2 (Juni 2011): 298, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>.

Hasaziduhu Moho, “Penjatuan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Hukum*, 1, No. 1, (Februari-Juli 2021): 2775-316, <https://media.neliti.com/media/publications/341568-penjatuan-hukuman-dalam-tindak-pidana-k-a378518e.pdf>.

Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret 2014), <https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf>

Hendry Julian Noor, “Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum*, 1, No. 2 (Februari 2016): 2336-4164, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d5440e5f601b5b8ab66ba7b/pasal-66-ayat-1-undang-undang-jabatan-notaris-dan-tindak-pidana-korupsi/>.

Ismail, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2, No. 2 (Februari 2018): 37-57, https://www.researchgate.net/publication/360789197_KAJIAN_YURIDIS_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_KORUPSI

Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudi, dan Gde Made Swardhana, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Acta Comitas*, 1, (Juni 2017): 2502-8960, <https://media.neliti.com/media/publications/242466-sanksi-hukum-terhadap-notaris-yang-melan-a6f743e3.pdf>.

Mohammad Yusril, Syachdin, dan Kamal, “Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, No. 2 (Juni 2024): 1411-3155, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/download/1114/190/3851>

Muhibuddin, dkk, “Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe”, *Jurnal Malikussaleh*

Mengabdi, 3 No. 1 (April 2024), hlm. 192,
<https://doi.org/10.29103/jmm.v3n1.17574>

R. Pandji Amiarsa, "Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, 19, No. 2 (Agustus 2020): 198-212. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>

Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Jurnal Hukum*, 1, No. 4 (Oktober – Desember 2012): 2301-8569,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/903>

Rio Cahya Nandika, "Penjatuhan Sanski Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Lima Tahun Atau Lebih", *Jurnal Hukum*, 27, Vol. 3 (Desember 2021),
https://scholarhub.ui.ac.id/notary?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fnotary%2Fvol3%2Fiss4%2F27&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Shahananda Selly, "Penegakann Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris yag Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)", *Jurnal Hukum*, 3, No. 19 (Maret 2021): 2684-7310,
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/19/>.

Sidiq, Mochamad Elmo, Asep Sunarsa, dan Amin Purnawan, "Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau", *Jurnal Akta*, 5, No. 1 (Maret 2018): 234-240,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2552/19132>

Siti Maimunah Syaputri, "Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Rio Law Jurnal*, 1, No. 2, (Februari 2025): 426, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

Ade Krisna Dwipayana, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Terbukti Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020

Ayu Pratiwi, "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022

Hafid Khoirul Umam, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Badan Urusan Logistik (Studi Kasus Putusan Nomor 90/Pid.Sus-Tpk/2022/PN. Smg)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023

Muh Fatuhrahman Bakri, “Akibat Hukum Pembuatan Salinan Akta Autentikyangberbeda Dengan Minuta Akta Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 247/Pdt.G/2016/Pn.Pb)”, *Thesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, 2024.